BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah jurnal yang berjudul *Economic World*, Claudya meneliti pentingnya kerja sama perdagangan bilateral menjadi semakin marak di dunia internasional. Namun kenyataan ini sama sekali bukan berarti bahwa perdagangan multilateral telah ditiada sepenuhnya, justru banyak pakar mengamati bahwa sebenarnya kerangka analitis yang dapat dipahami dan dibuktikan adalah bahwa regionalisme adalah induk bagi perdagangan baik bilateral dan multilateral. Perdagangan bilateral sediri akan mendukung terjadinya perdagangn multilateral, kedua bentuk ini tidak saling meniadakan.

Dalam realisasinya, perdagangan bilateral terbagi dalam tiga bentuk, yaitu; *Bilateral Custom Union* (BCU), *Bilateral Prefential Agreement* (BPA), dan *bilateral free trade agreement* (BFTA).

Materi yang dirundingkan dalam lingkup kerja sama perdagangan bilateral pun mengalami perluasan, dimana awalnya hanya berkisar pada pengurangan tarif dan pembatasan kuantitas juga mulai merambah pada pokok pikiran mengenai jasa keungan, isu hukum persaingan usaha, *International Property Rights*, hak buruh, perlindungan investasi dan perlindungan lingkungan. Menengok pada fakta yang terjadi, China telah bertransformasi menjadi kekuatan besar yang layak disejajarkan dengan Amerika, hal ini berangkat dari kenyataan bagimana Asia Timur secara umum, dan China secara

khususnya sangat giat melakukan perdagangan bilateral. Beberapa analisa mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk bagaimana China mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara yang telah terlebih dahulu aktif dalam *free trade* sejak tahun 1990an. Selain itu juga dikarenakan *sentiment* dari negara Asia Timur yang menilai bahwa negara Barat yang menarik investasi secara besar-besaran dan mendikte tindakan ekonomi melalui program IMF dianggap telah membuat krisis berkepanjangan. Selain alasan pragmatis, maraknya *free trade* juga dikarenakan *domino effect* dimana saat ada satu negara yang trurut bergabung dalam kerangka *free trade* dunia, maka negara lain pun turut melakukan hal yang serupa.

Bagi liberalisasi perdagangan sendiri, baik yang dibawah kerangka WTO atau tidak, kerja sama perdagangan bilateral membawa dampak negatif dan positif sendiri. Pihak yang pro terhadap *Bilateral Trade Agreement* (BTA) meyakini bahwa BTA akan menciptakan *trade creation* yang akan berlanjut pada kesejahteraan global, juga menciptakan *dynamic effect* yang menimbulkan sebuah efisiensi global. BTA juga dianggap lebih menjanjikan perkembangan ekonomi bagi negara berkembang, dan menstimulasi negara lain untuk melakukan hal yang sama. Melalui BTA yang lebih mudah dibandingkan multilateral, dapat menciptakan sebuah *road map* untuk negosiasi isu baru dan mendorong perusahaan domestik melakukan perbaikan.

Jika ditelusuri lebih kritis, maka kita dapat menemukan bahwa Amerika memiliki kepentingan selain ekonomi, yaitu menjadi pemimpin di sektor perdagangan bahkan keamanan. Hal ini berdasarkan analisa bahwa melalui Bilateral FTA yang relative lebih

praktis dan mudah terealisasi menjadikan Amerika semakin memperkokoh keberadaan Amerika di Asia dan sekaligus memperkuat sekutu dalam bidang keamanan. (buahpikir-claudya-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42906-economic%20world-Kerja%20Sama%20Perdagangan%20Bilateral.html Diakses 18/06/2013)

Dalam penelitian Decy Arifinsjah yang berjudul Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia – Amerika Serikat di Bidang Ekinomi dan Keuangan Pasang surut FDI AS ke Indonesia tidak terlepas dari perubahan rezim atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang meliberalisasi investasi asing di Indonesia pada tahun 1980an dan tahun 1990an. Namun krisis yang terjadi akhir tahun 1990an menyebabkan Indonesia tidak menjadi tujuan investasi yang menarik dimata investor asing. Keadaan ini mulai membaik setelah tahun 2001 ketika Pemerintah bersikap lebih terbuka terhadap investasi asing, daya tawar perusahaan-perusahaan Indonesia yang kompetitif, privatisasi dan rekapitalisasi bank-bank di Indonesia, dan privatisasi beberapa BUMN. Pada tahun 2005, ketika saham FDI di Indonesia mencapai US$10 Milyar, perusahaan multinasional AS mendominasi investasi asing di Indonesia. Hampir 60% FDI dari AS terkonsentrasi pada sektor minyak, gas, dan pertambangan. AS turut memberikan berbagai macam bentuk bantuan bagi Indonesia yang disalurkan melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Terkait dengan bidang ekonomi, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dari bantuan AS ini, diantaranya: Penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pengembangan iklim usaha dan perusahaan, stabilitas dan kewajaran sektor keuangan, perbaikan

kualitas jasa kebutuhan dasar, jasa lingkungan, jasa kesehatan, serta sektor pangan dan gizi. Selain itu, AS juga memberikan pinjaman luar negeri. Pinjaman bilateral yang berasal dari Amerika Serikat menempati peringkat kedua setelah pinjaman bilateral yang berasal dari Jepang.
(http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkrb%5CKajian_Kerja_Sama_Bilateral_RI-AS.pdf Diakses 20/6/2013)

Dalam meningkatkan pertumbuhan prekonomian suatu negara perlu adanya hubungan bilaterah antar kedua negara tersebut. Sehingga terjadi hubungan kerjasama antara kedua negara dari penelitian sebelumnya tergambarkan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat terjalin dari tahun ke tahun meningkat. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya hubungan bilateral dalam bentuk kerjasama investasi Amerika dengan Indonesia.

Kerjasama ini terbentuk karena adanya kepentingan – kepentingan dari kedua negara dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masing – masing negara. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat yang kita dapat lihat dengan adanya kerjasama investasi. Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan dan Indonesia memiliki daya tarik untuk para pengusahan – pengusahan dari Amerika untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi dari kedua negara ini akan meningkatkan perekonomian kedua negara tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kerangka Teoritis

Dalam kerangka penelitian ini, secara teoritis dibutuhkan adanya suatu kerangka pemikiran yang dapat berguna dalam menguji konsep-konsep dasar yang dipergunakan dalam studi ilmu hubungan internasional ketika meneliti suatu fenomena yang ada. Kerangka pemikiran ini diartikan sebagai konsep–konsep, model, analogi–analogi, pendekatan, generalisasi dan teori–teori yang dapat merangkum semua pengetahuan secara sistematis. Yang kesimpulannya bahwa, teori ini akan memberikan suatu kerangka pemikiran bagi upaya penelitian. Upaya ini juga tidak terkecuali yang mendasari akan adanya suatu penelitian didalam disiplin ilmu hubungan internasional.

2.2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, Organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan studi Hubungan Internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGO dan INGO serta makin kuatnya peran negara-negara di luar Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kancah Hubungan Internasional.

Pada tahun 1980-an, pola Hubungan Internasional masih bersifat *state centric* (dalam arti masih *bipolar*), tetapi muncul kekuatan-kekuatan *sub groups* yang

mengemuka. Studi Hubungan Internasional adalah interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Kemudian pada tahun 1990-an, runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis utama telah memunculkan corak perkembangan ilmu Hubungan Internasional yang khas. Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini (Perwita dan Yani, 2005:2-5).

Hubungan yang biasanya dilakukan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Guna memahami seberapa pentingnya ilmu Hubungan Internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu Negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus menghadapinya sehingga isu-isu seperti pekerja anak ini menjadi suatu permasalahan serius bagi pemerintah Indonesia (Robert & Sorensen. 2005:5).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi

tentang para pelaku bukan negara atau non-state actor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Sebagai aktor terpenting di dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama di dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005:128).

2.2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional

meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:34).

Sejak semula, fokus dari teori Hubungan Internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antarnegara dalam system internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mangajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005:33).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional;

- “Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktoraktor ekonomi dan masyarakat sipil.
- Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya , tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6)”.

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Menurut K.J. Holsti dalam buku *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995:362-363).

Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasistasnya sebagai aktor non-negara. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat dan bergabung.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya: 1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. 2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. 3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. 4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 2000: 362-363).

2.2.1.3 Perjanjian Internasional

Sebelum tahun 1969 hukum perjanjian internasional terdiri dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Kaidah-kaidah ini untuk sebagian besar telah dikondifikasikan dan disusun kembali dalm Konvensi Wina tentang Hukum Peejanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 menyusul masuknya 35 ratifikasi atau aksesi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 Konvensi.

Sesuai dengan definisi yang dipakai dalm Pasal 2 Konvensi, sebuah Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai:

Suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan hubungan antara mereka yang diatur oleh hukum interasional. Memang istilah traktat dapat dianggap sebagai nama umum dalam hukum internasional dan dapat mencangkup perjanjian antara organisasi-organisasi internasional disatu pihak dan sebuah negara dipihak lain meskipun harus diingat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tidak berlaku terhadap instrumen lain tersebut, melainkan menunjuk pada perjanjian antara negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertulis. Di lingkungan internasional, perjanjian itulah yang digunakan untuk hampir setiap jenis perbuatan hukum atau transaksi, mulai dari persetujuan yang sifatnya bilateral semata-mata antara negara-negara sampai suatu perjanjian yang paling pokok seperti instrumen konstitusi multilateral sebuah organisasi internasional. Hampir dalam semua kasus, tujuan sebuah perjanjian internasional adalah untuk membebankan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara pesertanya.

Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional adalah:

1. Perundingan (*negotiation*)
2. Penandatanganan (*signature*)
3. Ratifikasi (*ratification*)

Bentuk-bentuk perjanjian internasional adalah:

1. Traktat (*Treaty*)
2. Konvensi

3. Protokol
4. Persetujuan

   Persetujuan (*agreement*) sifatnya kurang resmi dibanding traktat dan konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding ini juga hanya digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang sifatnya teknis dan administratif. Pada umumnya *agreement* tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan *exchange of notes*.
5. Arrangement
6. Proses Verbal
7. Statuta
8. Deklarasi
9. Modus Vivendi

   Modus Vivendi adalah suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk diganti dengan *arrangement* yang sifatnya lebih permanen dan terinci. Biasanya Modus Vivendi dibuat secara sangat tidak resmi dan memerlukan ratifikasi.
10. Pertukaran Nota atau Surat
11. Ketentuan Penutupan (*Final Act*)
12. Ketentuan Umum (Rudy, 2002:123-135).

2.2.1.4 Ekonomi Politik Internasional

Pada dekade 1970-an sejumlah pemikir Hubungan Internasional (HI) mulai memikirkan bagaimana negara-negara yang selalu didorong nafsu berperang, pada waktu yang sama tetap berkeinginan untuk tetap menjalin kerjasama dengan negara lain (Hermawan, 2005:5).

Para pemikir tersebut (yaitu, menginginkan negara-negara yang selalu didorong nafsu berperang untuk tetap melakukan kerja sama dengan negara lain), sebagaimana yang dijelaskan Hadiwinata, diantaranya adalah Kohane dan Nye, mencoba untuk menggambarkan bagaimana saling ketergantungan di bidang ekonomi telah mendorong negara-negara untuk tetap menjalin kerja sama. Kemudian, Robert Gilpin mencoba mengidentifikasi keberadaan perusahaan multinational sebagai pelaku penting dalam mendorong negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi. Melalui aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional, modal, barang dan jasa dapat saling dipertukarkan melewati batasbatas negara dalam waktu relatif singkat sehingga dengan sendirinya meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. Sejak saat itu, menurut Hadiwinata ilmu ekonomi mulai mempengaruhi studi Hubungan Internasional (Hermawan, 2007:6).

Selama negara-negara di dunia menjadi saling bergantung dalam bidang satu sama lain, mereka membutuhkan peraturan untuk mengatur hubungan ekonomi internasional, yaitu perjanjian multilateral dan organisasi internasional (Rudy, 2005:75). Menurut T May Rudy, organisasi ekonomi internasional adalah semua organisasi dari suatu dasar antarpemerintah yang berhubungan dalam hubungan ekonomi keuangan dan

pembiayaan atau hal lain yang langsung mempunyai pengaruh pada hubungan tersebut (Rudy, 2005:76).

Konsep-konsep dan teori yang dipandang paling banyak diperbincangkan dalam ekonomi politik internasional pada bentang kontemporer yakni politik ekonomi, keterbelakangan, ketergantungan, saling ketergantungan, rejim internasional, pembangunan ekonomi, ekonomi kesejahteraan, dan teori ekonomi politik kontemporer lainnya.

Secara Umum Ekonomi-Politik Internasional merupakan studi yang memperlajari keerhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembanganya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional (Perwita dan Yani, 2005:75).

Sehingga secara empirik, tingkat saling ketergantungan dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi sebagai akibat proses transnasionalisme dalam ekonomi yang melewati batas negara seperti peningkatan perdagangan, proses globalisasi dan terciptanya kelompok ekonomi regional telah menjadikan suatu kondisi dimana tidak ada lagi suatu kebijakan ekonomi politik nasional yang bersifat domestik. (Perwita dan Yani, 2005: 77)

Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (*monodisiplin*), artinya bahwa implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interdepedensi, depedensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan

power politics, *realisme* dan *idealisme*, *linier* dan *strukturalis* internasional, *globalisasi*, atau *regionalisme*, dan lain-lain (Ikbar, 2002:21).

Secara umum, akan dijelaskan pengertian ekonomi politik terlebih dahulu sebelum menjelaskan defenisi/pengertian ekonomi politik internasional itu sendiri. Lord Robbin menjelaskan bahwa:

> Ekonomi politik dapat mengandung dua versi. *Pertama*, ialah versi ekonomi klasik yang memberi pengertian ekonomi politik sebagai suatu kesatuan menyeluruh dari suatu pembahasan, sejak dari ilmu ekonomi (murni, teori) itu sendiri (*economics science*) samapi dengan teori-teori tentang kebijakan ekonomi (*theory of economics policy*) yang meliputi analisis dari bekerjanya keuangan negara. *Kedua*, ekonomi politik versi modern yaitu ekonomi politik yang membahas bagaimana sistem ekonomi itu bekerja. Namun demikian, ia bukanlah *sciencetific economics* yang merupakan himpunan dari *value free generalization* tentang cara-cara sistem ekonomi itu bekerja. Ekonomi politik di sini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam bidang ekonomi (Ikbar, 2002:17).

2.2.1.5 Perdagangan Internasional

Perdagangan antarnegara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi, mereka melakukan transaksi dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri). Ini terjadi karena setiap negara dengan negara mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dari perbedaan tersebut diatas, maka atas dasar

kebutuhan akan barang lain yang saling menguntungkan sehingga terjadilah proses pertukaran yang dalam skala yang luas dikenal sebagai perdagangan internasional.

Pada awalnya hanya merupakan pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya yang selanjutnya disertai dengan perdagangan barang dan jasa sekarang ini. Akhirnya berkembang hingga pertukaran antar negara atau internasional yang mengandung resiko, seperti saham, valuta asing, dan obligasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak bahkan semaua negara yang terkait di dalamnya sehingga memungkinkan setiap negara melakukan penganekaragaman kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan masing – masing negara. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai perbedaan tingkat kapasitas produksi secara kuantitas, kualitas, dan jenis produksinya.

Adapun sebab – sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya alam (*natural resources*)
2. Sumber daya modal (*capital resources*)
3. Tenaga kerja (*human resources*)
4. Teknologi

Perdagangan antar negara berlangsung atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan mulai dari barter hingga transaksi jual beli antara para pedagangan dari dan diberbagai belahan wilayah hingga di luar batas negara.

Adam Smith dalam bukunya The Wealth Of Nation menjelaskan bahwa :

> Perdagangan bebas (free trade) antarnegara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut, jika salah satu dari negara tersebut tidak memaksakan

untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisit neraca perdagangan dari mitra dagangnya.

Pemikiran Adam Smith tersebut menerangkan bagaimana perdagangan internasional dapat menguntungkan kedua belah pihak. Suatu negara dapat memproduksi barang tertentu yang mempunyai keunggulan dalam bidang pengolahan dibandingkan dengan negara mitra dagangnya yang mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang yang merupakan suatu komoditas. Maka masing – masing negara tersebut akan lebih mengkonsentrasikan produksi mereka pada barang – barang yang secara mutlak mempunyai keunggulan. Kemudian mengekspor barang tertentu (yang merupakan kelebihan atau surplus untuk pemenuhan kebutuhan maupun komsumsi dalam negerinya) kepada mitra dagangnya sehingga terjadilah proses perdagangan internasional (Halwani 2005:1).

Menurut M.S Amir, perbedaan-perbedaan di atas menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya karena ada negara yang lebiih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu (Amir, 2000 : 22).

M.L. Jhanging mengatakan bahwa dasar teori pedagangan internasional adalah *"gain from trade"* artinya perdagangan internasional dapat terjadi karena salah satu negara atau kedua negara yang melakukan perdagangan melihat adanya keuntungan dari pertukaran tersebut. Hal ini bermanfaat untuk memperluas pasar bagi barang yang dihasilkan dalam negeri, transfer teknologi, dan meraih keuntungan komparatif dari spesialisasi ekspor (Jhanging, 2002:45).

Keanekaragaman kondisi produksi masing-masing negara, mendorong dua negara atau lebih untuk melaksanakan perdagangan. Selain itu terdapat alasan yang paling mendasar dari berlangsungnya perdagangan internasional yakni keunggulan komparatif, sebagaimana pemikiran dari David Ricardo (1817). Berdasarkan pemikiran ini, bahwa suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan jika melakukan spesialisasi produk yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain, misalnya produk suatu negara yang dihasilkan lebih efektif dengan biaya produksi yang paling minimal dibandingkan di negara lain. Dalam pelaksanaan perdagangan internasional, sebuah negara memberlakukan proteksi yakni pola sikap atau kecenderungan suatu negara untuk memberikan perlindungan bagi hasil produksi dalam negeri, diantaranya melalui tarif impor, kuota ekspor, pemberlakuan syarat tertentu, pemberian subsidi bagi industri dalam negeri.

Argumen-argumen yang merasionalisasi proteksi dalam perdagangan berikut:

1. Hambatan perdagangan yang menguntungkan suatu negara akan memberikan peluang bagi negara yang bersangkutan untuk memperoleh surplus pendapatan nasional. Dapat dilakukan dengan penerapan hambatan tarif dan non-tarif tertentu yang akan membuat nilai impor turun dan nilai ekspor naik. Biasanya dengan diterapkannya hambatan perdagangan ini akan mengundang tindakan balasan dari negara yang merasakan dampak langsung. Agar kebijakan penerapan tarif berhasil, maka negara yang memberlakukan hambatan tarif harus memiliki kekuatan monopoli.
2. Industri muda merupakan tahap bagi industrialisasi besar-besaran. Industri ini memerlukan perlindungan/ campur tangan pemerintah untuk pengawasan dan insentif/

dorongan, karena industri muda banyak dihadapkan pada kondisi eksternal yang kompetitif.

3. Mencegah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kondisi negara Dunia Ketiga dengan kepadatan penduduknya menyebabkan kebutuhan konsumsinya meningkat dan untuk memenuhinya dilakukan impor. Secara teori bagi negara yang sedang dalam ketidakseimbangan neraca pembayaran akan melakukan tindakan seperti memacu ekspor, penggalakan industri domestik dengan kerja sama pihak asing, pengenaan hambatan tarif dan bukan tarif atas komoditas impor dan kebijakan subsidi atau insentif lainnya.

Perdagangan internasional yang semakin meluas akan menimbulkan proses liberalisasi perdagangan kepada negara di sekitarnya. Proses ini menunjukkan suatu arah perekonomian yang bebas menurut paham liberalisme. Proses tersebut berimplikasi pada perekonomian suatu negara. Implikasi tersebut adalah:

1. Liberalisasi arus barang menuntut pengurangan hambatan tarif, bea, proteksi serta hambatan *local content.* Hambatan *local content* merupakan ketentuan hukum yang mewajibkan produk dalam negeri harus menggunakan komponen yang diproduksi dari dalam negeri.

2. Bertambahnya kapasitas produksi di seluruh dunia. Misalnya berkembangnya industrialisasi di berbagai lokasi di dunia dan berkembangnya perekonomian negara Eropa Timur, India, China dan negara-negara Asia yang menjadi *The Newly Industrializing Countries* (NICs).

3. Kemajuan teknologi dalam bentuk revolusi teknologi informasi mengatasi batasan mobilitas akibat batas-batas negara dan berupa penurunan biaya transaksi dan komunikasi.

4. Peningkatan Investasi Langsung Asing / *Foreign Direct Investment* (FDI).

Sejarah mencatat, negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber dari luar negeri. Dengan demikian tidak heran apabila, mengalir arus modal dari negara industri ke negara berkembang. Arus modal ini dibagi menjadi dua, yakni arus modal yang tidak harus dibayar kembali dan yang harus dibayar kembali. Arus modal yang harus dibayar kembali diklasifikasikan menurut sumber arus modal tersebut, yakni dari sektor pemerintah dan sektor swasta negara maju kepada sektor yang sama di negara berkembang. Arus modal yang masuk dari sektor pemerintah sebagian besar berupa tabungan resmi yang bersifat konsesional dan sering disebut sebagai bantuan luar negeri, walaupun demikian karena sifatnya tetap harus dikembalikan umumnya disebut sebagai utang luar negeri. Sedangkan arus modal yang masuk dari sektor swasta dapat berupa investasi langsung baik dari individu maupun TNC (*Transnational Coorporations*), investasi portofolio dan kredit ekspor (Kuncoro, 2003:247-248).

Penanaman investasi asing langsung merupakan bentuk yang berpengaruh bagi negara berkembang, karena biasanya disertai teknologi maju dan akses ke pasar internasional dalam satu paket. Sebagian besar investasi asing langsung dilaksanakan oleh TNC (Bahagijo, 2006: 29).

2.2.1.6 Bisnis Internasional

Bisnis Internasional merupakan suatu bidang kajian yang membahas tentang fenomena hubungan ekonomi internasional dimana negara dan aktor non-negara terlibat dalam sebuah kegiatan transaksi bisnis antar negara (Sugeng, 2002:26).

Aspek penting dalam transaksi ekonomi atau bisnis antar bangsa adalah para pelaku bisnis yang membentuk berbagai jaringan distribusi untuk mentransfer komoditi dari wilayahsurplusproduksi ke daerah-daerah minus produksi (Sugeng, 2002: 34).

Dalam kompetisi antar pelaku bisnis kontemporer pelaku utama bisnis internasional adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang (jasa dan komoditas) dan bahkan beroperasi melintasi batas-batas negara. Di dalam melakukan aktifitas bisnisnya, perusahaan pada umumnya mengemban dua macam misi: (1) penguasaan pangsa pasar bagi produk-produk yang dihasilkannya dan (2) mengemangkan aktifitas yang dapat memaksimalisasi perolehan *profit* atau keuntungan. Penguasaan pangsa pasar merupakan cita-cita hampir setiap perusahaan yang pada dasarnya bersedia melakukan apa saja sejak pengenalan produk baru (Sugeng, 2002: 36).

Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam memberikan sebuah penilaian tentang eksplanasi terhadap suatu pelaku bisnis internasionalharus dilihat pada (1) unit analisisnya (individu, komunitas, organisasi, negara, asosiasi regional atau gabungan antara berbagai aktor. (2) tingkat analisisnya (mikro, mezzo atau makro yang juga identik dengan lokal, nasional atau internasional, (3) keterkaitan antara variabel-variabelnya (independen atau dependen) (4) regularitasnya, dengan melihat apakah ada

suatu pola tertentu yang berulang, (5) dengan melihat apakah dapat melakukan suatu generalisasi terhadap suatu pola tertentu, serta (6) memprediksi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh suatu fenomena tertentu (Sugeng, 2002: 43).

Keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan bisnis internasonal tidak lepas dari faktor penguasaan pasar dalam menunjang produksi (Sugeng, 2002: 45).

2.2.1.7 Politik Luar Negeri

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. (Perwita dan Yani, 2005:50)

Politik luar negeri diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*: sebagai berikut:

> "politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional" (Perwita dan yani, 2005: 47).

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek interenal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap mejadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perannya dalam hubungan internasional (Perwita dan yani, 2005: 48)

2.2.1.7 Teori Investasi

Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri

dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004). Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat". Menurut Tambunan (2001) di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik *(domestic fixed capital formation)*. Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2007), pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan, atau pembelian barang- barang modal baru (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun import, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Nopirin (2000) ìInvestasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Selanjutnya Nopirin (2000), Faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah, perkiraan tentang penjualan dan kebijaksanaan ekonomi. Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh besaran-besarannya pengeluaran agregat yang wujud dalam perekonomian. Dan dalam perekonomian pengeluaran agregat itu sendiri dari empat jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi oleh perusahaan perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dari kenyataan itu dapatlah disimpulkan bahwa naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan

dari masingmasing atau gabungan faktor-faktor tersebut. Pada setiap moment, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2006). Untuk keperluan statistik, istilah investasi asing kita gunakan definisi dari IMF Balance of Payment Manual (edisi ke empat), yang juga digunakan oleh Bank Indonesia. Definisi tersebut adalah: ìinvestasi langsung mengacu pada investasi untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dalam kegiatan perusahaan dalam suatu perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut, sementara tujuan penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebutî. Istilah manfaat yang cukup lamaî tersebut merupakan investasi yang pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan.

Penanaman modal asing lebih menjamin dalam kelangsungan pembanguanan dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. Dengan adanya investasi asing, di negara tesebut akan mendapat keuntungan dalam teknologi, transfer aset dan ketrampilan, transfer keahlian manajemen, dan resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable. Perkembangan teknologi sudah dirasakan di Indonesia akibat dari sejumlah perusahaan asing, kebanyakan mereka perusahaan multinasional besar, yang sudah menanam modal di pasar Indonesia. Perusahaan ini sudah menyokong banyak dalam pengembangan

sumber daya negeri, membangun infrastruktur, menetapkan fasilitas pabrik untuk mengekspor dan/atau menyediakan produk dan jasa untuk pasar yang domestik itu.

Pasar Indonesia adalah suatu perspektif sangat panas untuk investasi dan banyak peluang yang tersedia untuk mengembangkan suatu perusahaan. Dan salah satu hal yang mendukung investasi asing di Indonesia adalah karena upah tenaga kerja Indonesia yang tergolong rendah (Fatahillah, 2008). Demikian menurut Jhingan (2000), negara berkembang tidak sanggup mengawali industri dasar dan industri kunci secara sendiri-sendiri. Sekali lagi melalui modal asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronika berat dan kimia, dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan modal asing pada suatu industri akan dapat mendorong perusahaan setempat dengan mengurangi biaya pada industri-industri lain yang dapat mengarah pada perluasan mata rantai industri terkait lainnya. Dalam hal ini modal asing akan membantu mengindustrialisasikannya.

Investasi asing langsung / (FDI) adalah proses dimana penduduk dari satu negara (negara sumber) mengakuisisi kepemilikan aset untuk tujuan pengendalian kegiatan produksi, distribusi dan lainnya dari sebuah perusahaan di negara lain (negara tuan rumah). Saldo Dana Moneter internasional Manual Pembayaran mendefinisikan FDI sebagai investasi yang dibuat untuk memperoleh kepentingan abadi dalam suatu operasi perusahaan dalam ekonomi selain dari investor, investor tujuan yang memiliki suara yang efektif dalam pengelolaan perusahaan . Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia 1999 Investment Report (UNCTAD, 1999) mendefinisikan FDI sebagai investasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dan mencerminkan kepentingan abadi dan kontrol

dari sebuah entitas penduduk dalam satu ekonomi (investor asing langsung atau perusahaan induk) dalam perusahaan penduduk dalam suatu perekonomian selain itu dari investor asing langsung. Jangka panjang istilah yang digunakan dalam definisi terakhir untuk membedakan FDI dari investasi portofolio, yang terakhir ditandai dengan menjadi jangka pendek di alam dan melibatkan omset tinggi efek. Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto). Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2007).

Gambaran umum dari definisi ini terletak pada istilah-istilah seperti kontrol dan hak pengendalian, yang merupakan fitur yang paling penting yang membedakan FDI dari portofolio investasi, karena investor portofolio tidak mencari kontrol atau bunga abadi. Ada kesepakatan, bagaimanapun, tentang apa yang merupakan saham mayoritas, namun paling sering minimal 10 persen kepemilikan dianggap sebagai memungkinkan perusahaan asing untuk mengerahkan pengaruh yang signifikan (berpotensi atau benar-benar dilakukan) atas kebijakan kunci dari proyek yang mendasari .

Perusahaan dapat memasuki pasar luar negeri baik melalui ekspor atau FDI. Mengekspor adalah kendaraan yang relatif berisiko rendah dan sederhana yang dapat digunakan untuk memasukkan asing pasar karena tidak melibatkan kehadiran nyata di pasar sasaran. Sementara relatif rendah risiko, ekspor tidak memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kontrol atas produksi asing dan kegiatan usaha atau manfaat dari peluang yang tersedia hanya melalui kehadiran aktual dalam pasar luar negeri.

Investasi asing langsung (FDI) terjadi ketika perusahaan berinvestasi secara langsung dalam produksi atau fasilitas lainnya di luar negeri negara di mana ia memiliki kontrol yang efektif.

Teori Internalisasi berpusat pada gagasan bahwa perusahaan bercita-cita untuk mengembangkan mereka pasar internal itu sendiri setiap kali transaksi dapat dibuat dengan biaya lebih rendah dalam perusahaan. Dengan demikian, internalisasi melibatkan bentuk vertikal integrasi membawa operasi baru dan kegiatan, sebelumnya dilakukan oleh perantara pasar, di bawah kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Sebagian besar penelitian ini, Namun, mengadopsi perusahaan multinasional sebagai unit analisis dan dikecualikan proses yang mendahului tingkat internasional pembangunan. Sebagai tanggapan, lebih dinamis, perspektif proses berbasis dipanggil untuk yang menuntut pengakuan internasionalisasi perusahaan. Saat ini, diterbitkan penelitian tentang internasionalisasi merupakan bagian penting dari internasional literatur bisnis.

(http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics.aspx Diakses 15/05/ 2013)